

MENURUNNYA SUARA PEMILIH TERHADAP PARTAI ISLAM

Bustami Thalib
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa
Email: Bustamithalib59@gmail.com

Abstrak

Beberapa masalah dalam kancah politik terutama yang berbasis Islam diprediksi tidak akan banyak memiliki tiket untuk mengusung bakal calon Presidennya di tahun ini. Hal ini terjadi karena dari partai-partai Islam masih kalah pamor dari tokoh Partai Nasional. Penulis mencoba meneliti faktor-faktor menurunnya suara pemilih terhadap partai Islam, sejak PKS, PPP, PAN, PKB. Hal ini menjadi klasik mungkin menurut penulis ada 4 faktor utama yang menyebabkan rendahnya suara pemilih partai Islam antara lain: (1) Partai Islam telah ditekan oleh rezim Suharto, karena menurut Suharto semua partai harus berdasarkan Pancasila. (2) Ada hal yang baru yang dilakukan partai lain seperti partai Perindo dengan memberikan modal untuk berdagang bagi kadernya, partai Nasdem dengan menghilangkan biaya (mas kawin) dalam mendaftarkan calonnya menjadi calon anggota legislatif maupun kepala daerah, dan melarang mencoret kadernya yang akan menjadi caleg apalagi bekas narapidana korupsi. (3) Kurangnya dana dalam melaksanakan program partai, karena dalam konsepsi partai Islam tidak ada paksaan/ancaman terhadap kader-kadernya sehingga mesin partai sering ketinggalan, misal melalui media elektronik. (4) Kurangnya tokoh dalam partai-partai berbasis Islam, tokoh-tokoh terkenal banyak yang sudah tua (sepuh) tidak maksimal lagi untuk berjuang untuk partai, mungkin hanya Almarhum KH Abdul Rachman Wahid (aka Gusdur) yang cukup populer, lain hal partai Nasdem, ada Surya Paloh, Demokrat ada SBY dan Gerindra ada Prabowo Subianto dan Perindo ada Hary Tanoseoedibjo, Megawati Sukarno Putri. Secara teori menurut Gustav Raburch untuk berjalan hukum harus merata, harus ada keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pemilih, Partai Islam

Abstract

Some problems in the political arena, especially those based on Islam, are predicted not to have many tickets to carry out their presidential candidates this year. This happened because the Islamic parties were still outraged by National Party leaders. The author tries to examine the factors of declining voter votes against Islamic parties, since PKS, PPP, PAN, PKB. This becomes a classic, maybe according to the author, there are 4 main factors that cause the low votes of Islamic party voters, including: (1). Islamic parties have been suppressed by the Suharto regime, because according to Suharto all parties must be based on Pancasila. (2). There are new things done by other parties such as the Perindo party by providing capital to trade for their

cadres, Nasdem party by eliminating costs (dowry) in registering candidates for legislative and regional head candidates, and prohibiting crossing out cadres who will become legislative candidates especially former narapida corruption. (3). Lack of funds in implementing party programs, because in the conception of Islamic parties there is no coercion / threat to their cadres so that party machines often miss out, for example through electronic media. (4). Lack of leaders in Islamic-based parties, many well-known figures who are already old are not maximal to fight for the party, perhaps only the late KH Abdul Rachman Wahid (aka Gusdur) is quite popular, another thing is the Nasdem party, There is Surya Paloh, Democrats have SBY and Gerindra is Prabowo Subianto and Perindo is Hary Tanoseoedibjo, Megawati Sukarno Putri. In theory, according to Gustav Raburch, to run the law must be equitable, there must be justice and legal certainty.

Keywords: Voters, Islamic Party

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia semakin islami. Namun, secara umum suara untuk partai-partai islami tak meningkat.

1. Islam-politik dibunuh Orde Baru, lalu bangkit setelah Reformasi. Pada masa Soeharto, tak boleh ada organisasi berbasis Islam. Semua harus berdasar Pancasila. Sejak 1998, larangan-larangan terkait politik identitas itu gugur. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali berlambang kubah dan berbasis Islam, setelah dipaksa menggunakan bintang sebagai lambang dan menjadikan Pancasila dasar partai tunggal.¹

Selain kembalinya PPP menjadi partai Islam, ada partai-partai dengan basis ormas Islam seperti PAN dan PKB yang tumbuh dari tradisi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ada pula yang terang-terangan menyatakan diri sebagai partai Islam, misalnya PKS.

Elan Islam-politik tak hanya mewujud dalam sistem elektoral. Dalam Dilema PKS (2013), Burhanuddin Muhtadi mengatakan gerakan Islam non-partai dengan spektrum ideologi dan aksi beragam tumbuh selepas Reformasi 1998. Ia merentang dari gerakan yang menoleransi kekerasan hingga yang menggunakan cara-cara damai gerakan Islam yang demokratis hingga yang anti-demokrasi.²

“Di antara gerakan Islam baru yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya ada Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad.”

Muhtadi juga mencatat munculnya organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang tidak mengharamkan penggunaan kekuatan dan Hizbut Tahrir

² <http://fwior.id/wpcontents/upload2015>, *Dilema PKS*, Burhawan Muhtadi, diakses 20 Januari 2017

¹ Kompas, 20 Agustus 2016

Indonesia (HTI) yang sangat keras menentang gagasan demokrasi, negara-bangsa, serta bermaksud mendirikan khilafah Islam di Indonesia.

Di luar urusan Islam-politik, dalam keseharian pun Islam secara kultural muncul di mana-mana. Ariel Heryanto dalam "*Upgraded Piety and Pleasure*" berkesimpulan pertumbuhan orang kaya baru di Indonesia dalam tiga dekade terakhir-termasuk di dalamnya sejumlah besar Muslim saleh-menyalurkan dorongan dan kekuatan mereka ke dalam ranah budaya.³

"*Identity Politics: Mobilising Religious Sentiment in Democratic Indonesia*" yang disusun Abdil Mughis Mudhoffir, dkk. menyebutkan kesalahan masyarakat Islam Indonesia juga tercermin dalam perilaku konsumsi mereka yang lebih memilih produk perbankan syariah, sekolah Islam, fashion islami dan bahkan obat-obatan islami.

Kesalahan itu juga ditandai lebih banyak Muslim perkotaan yang bergabung dengan kelompok Islam konservatif yang berkembang melalui majelis taklim atau majelis zikir.

³ Arief Heryanto, *Upgraded Piety and Pleasure*, diakses tanggal 2 Januari 2006

Gagasan mengislamkan Indonesia pun bukan wacana yang digelorkan tunggal oleh HTI semata.

Dengan cara berbeda, PBB, PPP, serta Partai Keadilan (sekarang PKS) mengusulkan tujuh kata yang dihapus dalam Piagam Jakarta, yakni "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam empat pelaksanaan sidang tahunan MPR hingga tahun 2002 mengenai amandemen Undang-undang Dasar (UUD). Namun upaya tiga partai itu gagal.

Meski tidak dapat diterapkan secara nasional, aturan-aturan bernapas Islam muncul dalam peraturan-peraturan daerah. *Politics of Shari'a Law* yang disusun Michael Buehler menyebutkan sebanyak 443 perda syariah diterapkan di 34 provinsi di Indonesia pada kurun 1998-2013.⁴

Enam provinsi paling banyak menerapkan perda syariah itu, antara lain Jawa Barat (103), Sumatera Barat (54), Sulawesi Selatan (47), Kalimantan Selatan (38), Jawa Timur (32), dan Aceh (25). Dengan kata lain, 67,7 persen atau 300 per 443 perda diberlakukan di hanya enam provinsi dengan 66 persen (289/443) di antaranya adalah kabupaten.

⁴ <http://www.magabel.co.id/2014/09/1411627971>, diakses tanggal 20 Januari 2013

Suara Partai Islam Begitu-Begitu Saja

Namun, saat faktor-faktor keislaman tersebut meningkat, perolehan suara partai islami hanya begitu-begitu saja. Dalam Pemilu 2004, total perolehan suara empat partai berbasis Islam (PPP, PKS, PPNUI, PBB) hanya 18,77 persen suara nasional. Di dua pemilu berikutnya, total perolehan suara empat partai islami itu pun menurun menjadi 15,15 persen di Pemilu 2009 dan 14,78 persen di Pemilu 2014.

Menariknya, sekalipun menang, 80 persen wilayah di mana empat partai islami tersebut mendapat suara di atas rata-rata tidak menerapkan perda syariah.

Ada pula fakta menarik. Buehler mencatat, justru di DPRD semua provinsi, kecuali Aceh, fraksi yang paling getol mengadopsi perda syariah adalah Golkar dan PDI Perjuangan. Dalam wawancara dengan BBC, Buehler mengatakan politisi yang butuh mobilisasi warga dalam konteks pemilihan umum mengandalkan kelompok-kelompok yang mendorong penerapan Perda Syariah. Politikus tersebut bisa jadi bukan kader partai islami.⁵

Salah satu pola yang digambarkan Buehler adalah cara Syarif Hidayat berkampanye dalam Pemilihan Walikota Tasikmalaya 2007. Saat itu, Syarif, yang merupakan wakil walikota Tasikmalaya, menerapkan Surat Keputusan Bersama

No.450/Kep.72 - Kesbang/2007 tentang Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya.

Isi keputusan tidak jauh dari dilarangnya aktivitas Ahmadiyah di Tasikmalaya. Setelahnya, ormas Islam setempat, Tholiban, mengangkat Syarif sebagai anggotanya. Setelah terpilih sebagai walikota Tasikmalaya, Syarif menerapkan perda syariah lebih banyak lagi.

Ajengan Zenzen, pimpinan Tholiban sekaligus pengampu Pesentren Al-Irsyadiyah, juga mendukung saat Syarif mencalonkan diri lagi pada Pilkada Tasikmalaya 2012. Selama masa kampanye yang berlangsung pada 2011, Syarif menerapkan perda syariah tentang pendidikan agama.

“Saya juga meragukan mereka (politisi) benar-benar yakin pada Perda Syariah atau mengetahui banyak tentang itu. Politisi Indonesia yang menerapkan perda seperti itu, dengan kata lain, adalah islamis oportunistis.” kata Buehler kepada BBC.

Wacana perda syariah pun tidak berhenti di situ. Setelah pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilgub DKI Jakarta, muncul sejumlah spanduk yang berisi tulisan tentang akan adanya Perda Syariah di DKI

⁵ Buchtar, *Ibid*, hal.30

Jakarta. Spanduk-spanduk yang bermunculan pada awal April 2017 itu memajang foto Anies-Sandiaga dan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab.

Kemenangan Anies-Sandi memang tidak lepas dari peran Rizieq. Semasa kampanye Pilkada DKI 2017, FPI bersama GNPf MUI yang dipimpin Bachtiar Nasir dan Forum Umat Islam (FUI) yang dipimpin Al-Khathtahth memimpin aksi menuntut Ahok—rival Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017—dipenjara karena telah menista Islam lewat pernyataannya mengenai surat Al-Maidah ayat 51.

Usaha Partai Meraup Sentimen Islam

Menurut Buehler, partai-partai islami tidak dapat memenangkan pemilu nasional dan daerah karena saling bentrok satu sama lain, alih-alih mengumpulkan kekuatan dan mendukung kandidat bersama. Hal itulah yang memecah suara muslim yang pada akhirnya tersalurkan via kepentingan partai-partai sekuler.

Sedangkan Abdil Mughis Mudhoffir dan kawan-kawan mengatakan meskipun umat Islam Indonesia semakin saleh, partai politik Islam belum bisa memanfaatkan islamisasi masyarakat dan mengubahnya menjadi kekuatan politik.

Secara umum, partai politik juga gagal menampilkan diri sebagai kendaraan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama umat Islam.

Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMCR) pada 14-20 Mei 2017 menyatakan responden paling tidak percaya DPR dan partai politik di antara lembaga negara lainnya. Dalam survei tersebut, kepercayaan terhadap DPR hanya 63 persen dan Partai Politik 56 persen, jauh dibawah TNI (90 persen), Presiden (86 persen), dan KPK (86 persen).

2. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam perkembangan baru partai non Islam seperti Perindo, partai ini sangat aktif mempromosikan kegiatan dalam membantu kadernya misal dengan memberi modal gerobak dorong yang ditandai hadiah (partai Perindo).

Informasi melalui media elektronik berupa televisi, setiap saat kita semua kegiatan poster diinformasikan. Juga beberapa partai politik seperti Nasdem, dalam programnya bahwa para calon anggota DPPD, DPRI, DPD tidak diminta biaya atau mas kawin untuk membantu partai. Dalam pencalonan Kepala Daerah partai Nasdem tidak meminta biaya kampanye Partai.

Dari kedua contoh tersebut diatas, sudah menarik simpati masyarakat untuk memilih kedua partai tersebut.

Apalagi partai tidak akan mencalonkan kadernya menjadi calon legislatif bagi bekas narapidana korupsi.

3. Kurangnya dana dalam melaksanakan program partai, karena dalam konsepsi partai Islam pemberian dana, terutama dana kampanye tidak diharuskan ada dana dari para kader yang mampu, sehingga dana partai sangat kurang, mengharapkan dana kampanye dari pemerintah sangat kurang dan berbelit-belit, karena partai tidak mendukung pendana (partai Penguasa)

Jauh sebelum melancarkan aksi 212, FPI pun telah menyatakan kesangsiannya terhadap partai politik yang ada di Indonesia dengan menyatakan bakal membuat partai politik sendiri.

“Karena krisis multi-dimensi yang menimpa bangsa ini kompleks dan kronis, itu tidak bisa disembuhkan oleh pil reformasi, tetapi harus diberi suntikan revolusi. Dan bukan dengan revolusi lama, tetapi sebuah revolusi Islam yang berlandaskan kaselah dan keimanan kepada Allah. Jadi, kesimpulannya, bukan FPI menjad sebuah partai seperti yang diberitakan media, tetapi FPI akan menjadi sebuah partai,” sebut Rizieq seperti dilansir Problems of

Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society (2010, hlm. 209)⁶

Pertarungan di Pemilu 2019 nanti akan menarik karena sejumlah elit partai mulai mendekati ke elit gerakan massa aksi 212.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan peserta ‘Tamasya Al-Maidah’ yang telah memenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Terima kasih atas keberpihakan, atas keberanian, atas pengorbanan saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo dalam sambutan kepada para pendukung Anies-Sandiaga di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Sementara itu, tokoh PAN Amien Rais berkunjung ke Mekah, khusus untuk menemui Rizieq. Amien pun menjadi Pembina Persaudaraan Alumni 212. Sedangkan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB, menjadi kuasa hukum HTI yang dibubarkan pemerintah melalui penerapan Perppu Ormas yang dibuat tak lama setelah aksi 212.

Dengan contoh Prabowo dan Amien Rais, terlihat bagaimana partai berupaya

⁶ <http://www.frmol.co/read2010>, Rizieq, *Problem of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*.

meraup potensi suara itu. Namun, jika partai-partai konvensional peserta pemilu ternyata juga gagal menambah suara secara signifikan pada pemilu nanti, yang dapat diperkirakan adalah dua hal.

Apabila kita hubungkan azas kepastian hukum maka dapat dimengerti antara kepastian hukum dengan pemilihan umum/partai politik.

Gustav Radbruch dikutip dari Satjipto Rahardjo memberi kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskusi kita mengenai topik kepastian hukum. Radbruch tidak akan membuat ekspose seperti akan diuraikan di bawah ini, apabila ia tidak dihadapkan kepada fenomena hukum modern. Radbruch berbicara tentang adanya cita hukum. Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Radbruch, yang tesisnya sudah diterima luas oleh komunitas ilmu hukum, mengatakan, bahwa cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtsc sicherkeit*).⁷

Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*Spannungsverhaeltnis*) satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum; tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam jagat ketertiban*, Uki press, Jakarta, 2006 hlm.135

dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.

Perbincangan Radbruch mengenai cita hukum tersebut menjadi lebih menonjol bila ditempatkan pada latar belakang kehadiran hukum modern. Semakin hukum itu dituliskan atau dipoitifkan, semakin kuat pula nilai perbincangan mengenai cita hukum dengan sekalian konsep tentang nilai-nilai dasar yang menyertainya.

Kemunculan hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya, yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu. Nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Sudah sejak masa ribuan tahun kedua nilai tersebut ada dalam wacana hukum, tetapi kepastian hukum adalah sesuatu yang baru.

Sekali lagi, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipoitifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law being written down*," bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu tidak ada hubungannya dengan "*die Sicherheit durch das Recht*," seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian

tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.⁸

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik,” “kesopanan.” Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Fuller yang dikutip Satjipto Rahardjo juga memajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*),
- (2) peraturan tersebut diumumkan kepada publik,
- (3) tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem,

- (4) dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum,
- (5) tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan,
- (6) tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan,
- (7) tidak boleh sering diubah-ubah,
- (8) harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁹

Baik Radbruch maupun Fuller memberikan pandangan tentang masalah kepastian hukum dengan rincian yang hampir sama. Pada hemat saya, keduanya, dan banyak penulis serta ilmuwan lain, bisa dimasukkan ke dalam kubu liberal-individual. Kepastian hukum dijadikan bastion untuk menjaga dan menjamin keselamatan individu.

Aliran liberal dalam hukum memang mempunyai sejarah panjang (Rahardjo, 1996), yang membentang dari masa feodalisme sampai abad kesembilanbelas di Eropa. Oleh sebab itu dapatlah dipahami, bahwa hukum modern itu sarat dengan hasil-hasil perkembangan dan pergulatan sosio-kultural-politik-ekonomi yang ada di bagian dunia tersebut. Perkembangan tersebut, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari munculnya golongan burjuasi dan sebuah masyarakat yang

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ibid.* hlm. 135

⁹ Satjipto Rahardjo, cetakan keenam, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm.130

disebut *civil society*. Golongan borjuis tersebut merupakan faktor pendorong kuat dan menentukan bagi lahirnya hukum modern. Sebagai golongan baru yang sekalipun kuat, mereka masih membutuhkan dukungan legitimasi hukum. Masalah kepastian hukum menjadi sangat penting bagi menjaga kelangsungan hidup mereka. Sekalipun sudah menyebar ke segenap penjuru dunia, tetapi ia adalah tetap suatu institusi dan produk yang unik. Maka memahami hukum modern harus melibatkan asal-usul sosial dan lain-lain dari hukum tersebut, sehingga di-peroleh pencerahan.

Di atas sudah dikemukakan, bahwa munculnya hukum modern berkorespondensi secara erat dengan negara modern, industrialisasi dan sistem produksi ekonomi yang kapitalistis. Sistem kenegaraan, politik dan ekonomi yang rasional itu membutuhkan pula jaminan tempat berpijak yang rasional dan komponen-komponen yang bisa diramal/ diprediksi.

Radbruch dan Fuller sama-sama menyinggung masalah pelaksanaan dari kepastian hukum. Radbruch berbicara tentang "*Geltung des positiven Rechts*," sedang Fuller mengatakan, bahwa "harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari." Pada hemat

saya, di sini sebetulnya pembicaraan sudah memasuki ranah yang berbeda daripada waktu membicarakan kepastian hukum sebagai peraturan positif.

Apabila kepastian hukum dibicarakan sebagai "kepastian pelaksanaan peraturan," maka kita sudah memasuki ranah aksi, perilaku, manusia dan faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Kita memasuki masalah dan wacana perilaku dan psikologi sosial.

Partai-partai berbasis Islam diprediksi tak akan memiliki tiket untuk mengusung bakal calon presidennya di tahun ini. Hal itu terjadi karena tokoh dari partai-partai Islam masih kalah pamor dari tokoh partai nasional. Peneliti senior *Founding Fathers House (FFH)*, Dian Permata, mengatakan, di era sebelumnya, partai Islam memiliki tokoh sekaliber Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tapi saat ini, tak ada tokoh partai Islam yang kharismanya melebihi Presiden ke 4 Republik Indonesia tersebut. "2014 momentumnya partai nasional karena partai Islam kekurangan tokoh. Pasca-Gusdur tidak ada lagi." Masyarakat pemilih di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) juga akan condong memberikan hak suaranya pada partai nasional karena citra partai Islam melorot drastis. Dengan begitu,

partai Islam akan kesulitan memenuhi ambang batas mencalonkan presiden (*presidential threshold*) di pilpres nanti. Penyebabnya melorotnya kepercayaan publik pada partai Islam adalah karena adanya petinggi atau kader partai Islam yang terjerat kasus korupsi seperti PKS. Akhirnya semua partai Islam dinilai negatif, dan dianggap tak berbeda dengan partai politik lainnya. Kepercayaan publik pada partai Islam tak akan banyak mengalami gangguan jika saja PKS langsung menghadapi publik saat kasus impor daging sapi terkuak. Presiden PKS Anis Matta sempat meminta maaf kepada publik, tapi permintaan maaf sangat terlambat karena baru dilakukan sekitar akhir 2013. "Ini soal cara berkomunikasi, seharusnya dari awal (PKS minta maaf) sehingga patah hati (publik) tidak terlalu dalam. Sekarang tugas besarnya adalah menciptakan momentum. Apakah bisa?". Seperti diketahui, saat ini ada empat partai yang dikenal sebagai partai berbasis Islam. Di antaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Masing-masing partai itu telah mulai memunculkan figur yang digadang-gadang akan diusung sebagai calon presiden periode 2014-2019. Melalui Pemilihan Raya, PKS memiliki dua

figur favorit, yakni Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Perindo ada Hary Tanosoedibjo, seperti Demokrat ada Sby, Gerindra ada Prabowo Subianto, PDIP ada Megawati Soekarno Putri, Nasdem ada Surya Paloh. Sementara PAN telah lebih awal memutuskan ketua umumnya, Zulkipli Hasan, sebagai bakal calon presiden. Selanjutnya untuk PPP, nama calonnya santer terdengar dan mendapat dukungan besar dari internal. Penentuannya akan dilakukan dalam waktu dekat melalui Rapat Pimpinan Nasional PPP. Terakhir, yang paling menyedot perhatian adalah PKB. Tiga tokoh yang dikaitkan dengan calon presiden dimunculkan sekaligus, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. PKB mengeluarkan sinyal baru akan memutuskan calon presidennya setelah hasil pileg diketahui.

Penutup

Adapun kesimpulan dari tulisan ini. Dari penelusuran penulis maka penulis menarik kesimpulan bahwa ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan menurunnya suara pemilih terhadap partai Islam.

1. Pada zaman orde baru, ditekan sedemikian rupa sehingga ruang geraknya terbatas oleh itu Rezim Suharto melarang adanya organisasi

berasas Islam, semua harus berdasarkan Pancasila.

2. Ada hal yang baru dilakukan partai lain seperti Perindo dengan memberikan modal usaha untuk berdagang, bagi kadernya partai nasdem dengan menghilangkan biaya kampanye yang dikenal mas kawin dalam mendaftarkan kadernya untuk menjadi calon anggota legislatif, maupun calon kepala daerah, dan melarang, mencoret kadernya yang ikut pemilu apabila bekas narapidana korupsi.
3. Kurangnya dana dalam melaksanakan program Partai, karena dalam program kerja Partai Islam tidak memaksa/ mengancam kadernya dalam memegang keuangan partai, sehingga mesin partai sering tidak berjalan mulus, juga tidak ada promosi informasi melalui media televisi, sedangkan Indonesia sangat luas, sehingga Partai Islam sulit berkembang.
4. Kurangnya tokoh dalam partai berbasis Islam tokoh-tokoh terkenal, banyak yang sudah meninggal, sehingga sangat mempengaruhi pengaruh partai, mungkin hanya Abdul Rachman Wahid (Gusdur) yang cukup populer bagi bangsa Indonesia, sedang partai lain masih ada tokoh yang populer seperti Nasdem ada Surya Paloh, Demokrat ada

SBY, Gerindra ada Prabowo Subianto, PDIP ada Megawati Sukarno Putri dan Perindo ada Hary Tanosoedibjo.

Teori yang digunakan adalah teori Gustav Radbruch untuk berjalannya hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006

—————, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2006

Kompas, 20 Agustus 2016

Internet

http://fwi.or.id/wpcontent/upload_dilema_pks, Burhanuddin Muhtadi

<http://www.molca/read2013/01/2006>, Arief Heriyanto, *Upgrade Piety And Plesure*, diakses tanggal 2 Januari 2006

http://fwi.or.id/wp.contentupload_Buchtar, Buchtar, pemilu di Indonesia

<http://www.indo.co/read2000>, riziq, *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*